MORFOLOGI KAMPUNG MULTIENTNIS BERBASIS NEGOSIASI RUANG DI KORIDOR LAYUR KAMPUNG MELAYU SEMARANG

Mohammad Sahid Indraswara[1*], Epri Widiangkoso[2], Septana Bagus Pribadi[1], Fahmi Syarif Hidayat[3], Renita Ayu Ramadhani[1]
[1]Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang
[2]Departemen Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang
[3]Departemen Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Politeknik Pekerjaan Umum, Semarang
[*]Email: sahidarc@gmail.com

ABSTRAK

Koridor Layur di Kampung Melayu Semarang merepresentasikan ruang hidup adaptif sejak abad ke-17 dengan mengakomodasi keragaman etnis Arab, Cina, Banjar, dan Melayu melalui strategi tata ruang yang mempertahankan integrasi komunitas. Penelitian ini bertujuan mengungkap mekanisme negosiasi ruang bagi koeksistensi antaretnis selama lebih dari tiga abad di tengah tekanan regulasi *Wijkenstelsel* kolonial. Kerangka analisis mengintegrasikan urban morphology Trancik (1986) dan Conzen (1960) serta teori produksi ruang Lefebvre (1991) untuk membaca negosiasi antara ruang yang dirancang melalui regulasi kolonial dan ruang yang dihidupi komunitas. Rekonstruksi morfogenetik dilakukan berbasis peta historis abad ke-18 hingga ke-20, observasi lapangan (2020–2024), dokumentasi tipologi bangunan, pengukuran kavling aktual, dan wawancara mendalam tokoh komunitas. Analisis figure-ground, linkage, dan place menunjukkan bahwa integrasi antaretnis bukan terbentuk dari pembagian wilayah horizontal melainkan dari dialektika spasial berlapis sebagai hasil negosiasi antara ruang yang dirancang dan ruang yang dihidupi pada tiga elemen arsitektur yaitu ruko Tionghoa sebagai *visual buffer*, jaringan lorong sebagai simpul negosiasi harian, serta Masjid Menara dan Klenteng Dewa Bumi sebagai identitas kawasan. Ketahanan sosial Koridor Layur bersumber dari kecerdasan arsitektural komunitas dalam memproduksi ruang yang dihidupi sebagai respons terhadap tekanan kolonial. Temuan ini menawarkan model alternatif pengelolaan ruang multietnis bagi kawasan bersejarah Asia Tenggara.

Kata Kunci : Morfologi perkotaan, dialektika spasial, koeksistensi, *lived religion*, permukiman multietnis.

ABSTRACT

The Layur Corridor in Kampung Melayu Semarang represents an adaptive living space since the 17th century, accommodating Arab, Chinese, Banjar, and Malay communities through spatial strategies that sustain integration. This study uncovers spatial negotiation mechanisms enabling interethnic coexistence for over three centuries amid colonial Wijkenstelsel regulations. The analytical framework integrates Trancik (1986), Conzen (1960), and Lefebvre's (1991) space production theory to read negotiations between conceived space as space designed through colonial regulations and lived space as space inhabited by the community. Morphogenetic reconstruction drew on historical maps from the 18th to 20th century, field observations (2020–2024), building typology documentation, plot measurements, and community interviews. Figure-ground, linkage, and place analysis reveals that interethnic integration emerged not from horizontal territorial division but from layered spatial dialectics as a negotiation product between conceived space and lived space across three architectural elements, namely Chinese shophouses as visual buffers, alley networks as daily negotiation nodes, and Masjid Menara and Klenteng Dewa Bumi as spatial identity anchors. The corridor's social resilience stems from community architectural intelligence actively producing lived space in response to colonial pressure. This finding offers an alternative model for multiethnic space management in Southeast Asian historic districts.

Keywords *: Urban morphology, spatial dialectics, coexistence, lived religion, multiethnic settlements.*

Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

1. PENDAHULUAN

Kota-kota pelabuhan di Asia Tenggara secara historis terbentuk sebagai zona pertemuan yang menghubungkan berbagai kelompok etnis melalui jalur perdagangan maritim (Widodo 2004; Rukayah et al. 2021). Keberagaman ini tidak hanya terekspresi dalam praktik sosial, melainkan juga dalam konfigurasi kavling, tipologi bangunan, dan struktur koridor sebagai elemen morfologi kawasan yang dapat dibaca dan dianalisis secara arsitektural (Thinh and Kamalipour 2022; Achmadi and Josey 2023; Le et al. 2025). Namun, penerapan regulasi *Wijkenstelsel* oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda membawa asumsi bahwa pemisahan etnis diwujudkan secara spasial dalam bentuk segregasi wilayah (Kusno 2000; Widodo 2004; Padawangi 2025).

Kajian morfologi perkotaan tentang kawasan kolonial cenderung membedah struktur fisik sebagai artefak regulasi top-down tanpa menggali cara komunitas lokal membangun strategi spasial bottom-up yang melampaui ketetapan kolonial (Fakih 2023; Haeri et al. 2025). Akibatnya terbentuk kerangka yang gagal menjelaskan bagaimana ruang-ruang hybrid di kota pelabuhan bertahan dan beradaptasi selama berabad-abad (Ahn 2024). Charalambous (2020) menunjukkan bahwa bentuk fisik kota dan interaksi warga tetap berlangsung melampaui batasan aturan penguasa, sementara Rukayah et al. 2021) mengidentifikasi bahwa koridor-koridor perdagangan Semarang mengandung zona kontak mikro yang memungkinkan warga lintas etnis berinteraksi melampaui batas kolonial. Studi-studi ini memperkuat argumen bahwa elemen arsitektur vernakular bekerja sebagai *spatial agency* yang aktif memediasi perbedaan budaya, namun mekanisme morfologisnya pada skala kavling, bangunan, dan koridor belum cukup dieksplorasi (Achmadi and Josey 2023). Studi-studi tersebut umumnya berhenti pada identifikasi *spatial agency* secara umum tanpa membedah bagaimana negosiasi tersebut termanifestasi pada elemen morfologi konkret yaitu kavling, tipologi bangunan, dan jaringan Lorong. Penelitian ini berbeda dari studi terdahulu dengan mengoperasionalkan teori produksi ruang Lefebvre pada instrument morfologi Trancik dan Conzen, sehingga negosiasi spasial antar etnis tidak hanya dapat dibaca pada tingkat wacana sosial-budaya, melainkan juga pada skala arsitektural.

Teori produksi ruang Lefebvre (1991) menawarkan kerangka untuk membaca mekanisme ini lebih dalam. Lefebvre menyatakan bahwa ruang diproduksi melalui tegangan antara ruang yang dirancang oleh penguasa dan perencana serta ruang yang dihidupi dan dimaknai oleh komunitas. Dalam konteks kawasan multietnis historis, tegangan ini tidak menghasilkan konflik maupun integrasi penuh, melainkan negosiasi spasial berkelanjutan yang terekam dalam struktur morfologi kawasan. Perspektif ini belum banyak dioperasionalkan pada skala arsitektur, khususnya dalam membaca bagaimana tipologi bangunan, pola kavling, dan jaringan lorong bekerja sebagai arena negosiasi antara ruang yang dirancang dan ruang yang dihidupi (Stanek 2020; Viderman et al. 2023).

Studi mengenai *lived religion* memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa praktik religi harian tidak terbatas pada bangunan ibadah melainkan menyatu dengan tatanan ruang kawasan (Samore 2025; Sun et al. 2025). Pola ini memisahkan fungsi ekonomi pada bagian depan dengan fungsi privat pada bagian belakang dan membentuk lapisan spasial yang bersumber dari nilai budaya komunitas. Penelitian di wilayah Global South juga memperlihatkan bahwa identitas kawasan tidak hanya terbentuk melalui aturan pemerintah, melainkan juga melalui interaksi warga pada bangunan dan jalan sebagai elemen morfologi yang hidup (Erfani 2022; Mayer and Pawlik 2023; Budiman and Kusno 2025).

Fenomena ini terlihat jelas di Koridor Layur, Kampung Melayu Semarang, sebuah permukiman yang terbentuk sejak awal abad ke-17 sebagai simpul perdagangan di tepian Kali Semarang (Widiangkoso 2002; Rukayah and Abdullah 2021). Berbeda dari asumsi segregasi kolonial, koridor ini menampilkan morfologi hybrid antara komunitas Arab, Tionghoa, Banjar, dan Melayu yang hidup berdampingan dalam kepadatan tinggi, dengan dua landmark religius utama berupa Masjid Menara (1802 M) dan Klenteng Dewa Bumi (1901 M). Analisis awal menunjukkan bahwa kepemilikan lahan di kawasan ini tidak terkotak-kotak per blok etnis, melainkan menunjukkan pola pembauran morfologis yang bersumber dari mekanisme

kesepakatan keruangan informal antar-komunitas (Widiangkoso 2002).

Permasalahan utama yang diangkat penelitian ini adalah bagaimana *built form* Koridor Layur bekerja sebagai sistem mediasi koeksistensi antaretnis dalam konteks morfologi kawasan. Penelitian ini mempertanyakan mekanisme spasial yang memungkinkan dua komunitas dengan karakter budaya yang kontras yaitu Tionghoa berorientasi publik-dagang dan Arab Hadramaut berorientasi privat-religius berbagi satu koridor yang sama selama lebih dari tiga abad tanpa segregasi wilayah formal.

Penelitian ini mengintegrasikan tiga kerangka teoritis untuk menjawab permasaahan tersebut. Urban Morphology dari Roger Trancik (1986) dan Conzen (1960) digunakan untuk membedah evolusi struktur fisik kawasan melalui analisis figure-ground, linkage, dan place. Teori produksi ruang Lefebvre (1991) digunakan untuk membaca negosiasi antara ruang yang dirancang dan ruang yang dihidupi dalam struktur morfologi kawasan. Konsep *spatial agency* dan *lived religion* digunakan untuk menafsirkan bagaimana elemen arsitektur dan praktik keagamaan harian membentuk lapisan ruang secara aktif (Awan et al. 2011; Samore 2025; Sun et al. 2025). Novelty penelitian ini terletak pada pengoperasionalan kerangka Lefebvre ke dalam analisis morfologi arsitektur, dengan mengidentifikasi *dialektika spasial berlapis* sebagai mekanisme negosiasi yang bekerja pada skala mikro kavling dan bangunan hingga skala makro koridor dan kawasan, sehingga menawarkan kontribusi baru bagi kajian *urban morphology* kawasan multietnis di Asia Tenggara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus intrinsik (Creswell 2013) untuk mengeksplorasi adaptasi morfologi di Koridor Layur. Metode ini dipilih untuk mendapatkan kedalaman konteks historis dan kultural yang tidak dapat tereduksi menjadi variabel numerik, sejalan dengan praktik penelitian morfologi perkotaan pada kawasan bersejarah multikultural di Asia (Erfani 2022; Le et al. 2025). Koridor Layur dipilih sebagai unit analisis tunggal karena merepresentasikan kasus ekstrem dari permukiman multietnis pesisir abad ke-17 yang mempertahankan integrasi sosial di tengah tekanan regulasi *Wijkenstelsel*, sekaligus mewakili celah empiris yang signifikan dalam literatur internasional tentang kota-kota pelabuhan Global South (Widodo 2004; Rukayah et al. 2021; Budiman and Kusno 2025).

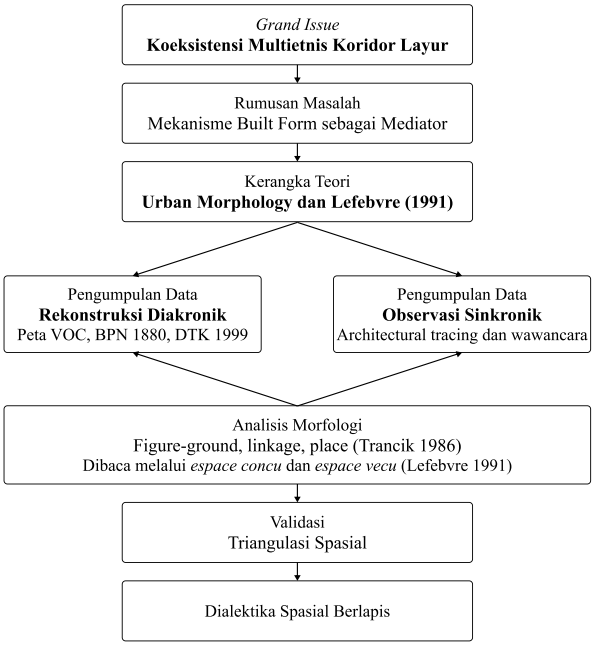
Kerangka analisis bersifat interdisipliner dengan mensintesiskan metode morfologi perkotaan sebagai instrumen bedah fisik dan perspektif produksi ruang Lefebvre (1991) untuk mengungkap mekanisme negosiasi di balik struktur kawasan. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data primer dan sekunder melalui tahapan berikut.

1) Rekonstruksi Diakronik.
   Rekonstruksi diakronik dilakukan melalui penelusuran dan digitalisasi tiga lapis data peta historis yaitu peta kawasan Semarang era VOC abad ke-18 yang diperoleh dari arsip Nationaal Archief Belanda, peta kadastral BPN Kota Semarang tahun 1880, dan peta DTK Semarang tahun 1999 sebagaimana termuat dalam Widiangkoso (2002). Ketiga peta ini didigitalisasi menggunakan perangkat lunak QGIS dengan metode georeferencing berbasis titik kontrol lapangan untuk memastikan akurasi spasial antar periode. Proses digitalisasi mencakup delineasi batas kavling, jalur sirkulasi, dan posisi bangunan utama pada setiap periode sehingga menghasilkan peta transformasi diakronik yang dapat dibandingkan. Pendekatan rekonstruksi morfogenetik Conzen (1960) digunakan sebagai landasan periodisasi transformasi spasial, yang terbukti efektif dalam kajian kawasan bersejarah multietnis di kota-kota Asia (Haeri et al. 2025; Le et al. 2025)
2) Observasi Sinkronik (2020–2024).
   Observasi lapangan dilakukan menggunakan teknik *architectural tracing* untuk merekam kondisi eksisting tipologi bangunan, pola kavling aktual, dimensi Lorong, dan jaringan sirkulasi antar-etnis. Pengukuran lapangan mencakup lebar Lorong, kedalaman kavling, ketinggian bangunan, dan material fasad sebagai data fisik primer yang kemudian dibandingkan dengan kondisi pada peta historis. Dokumentasi fotografis dilakukan per segmen koridor untuk merekam karakter

arsitektur dan perubahan fungsi bangunan. Observasi diperkaya dengan wawancara kepada informan kunci yang mencakup tokoh komunitas Arab dan Tionghoa serta penghuni lama dengan masa tinggal lebih dari dua generasi untuk mendapatkan narasi tentang praktik berbagi ruang yang berlangsung secara informal.

3) Analisis Morfologi
Data fisik dan narasi dianalisis melalui tiga kerangka urban morphology Trancik (1986) secara bertahap. Analisis figure-ground dilakukan dengan membandingkan peta solid-void antar periode untuk membaca perubahan kepadatan dan pola kavling. Analisis linkage dilakukan dengan memetakan jaringan sirkulasi, lorong, dan konektivitas antar bangunan sebagai sistem yang menghubungkan komunitas lintas etnis. Analisis place dilakukan dengan menginterpretasikan elemen identitas kawasan melalui posisi landmark religius dan pola aktivitas komunal. Ketiga hasil analisis ini kemudian dibaca melalui kerangka Lefebvre (1991) untuk mengidentifikasi manifestasi ruang yang dirancang dan ruang yang dihidupi dalam struktur morfologi kawasan.

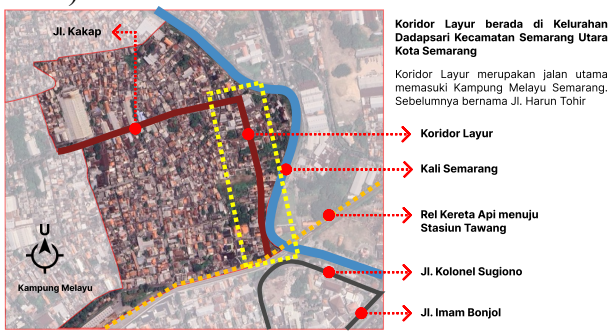
4) Triangulasi Spasial
Validitas temuan dipastikan melalui triangulasi spasial tiga arah yaitu antara data peta historis, kondisi fisik eksisting hasil observasi lapangan, dan narasi sosial hasil wawancara. Setiap pernyataan morfologis diverifikasi dengan minimal dua sumber data yang berbeda sebelum diinterpretasikan sebagai temuan. Ketidaksesuaian antara data peta dan kondisi eksisting dicatat sebagai bukti transformasi dan menjadi bagian dari analisis diakronik.

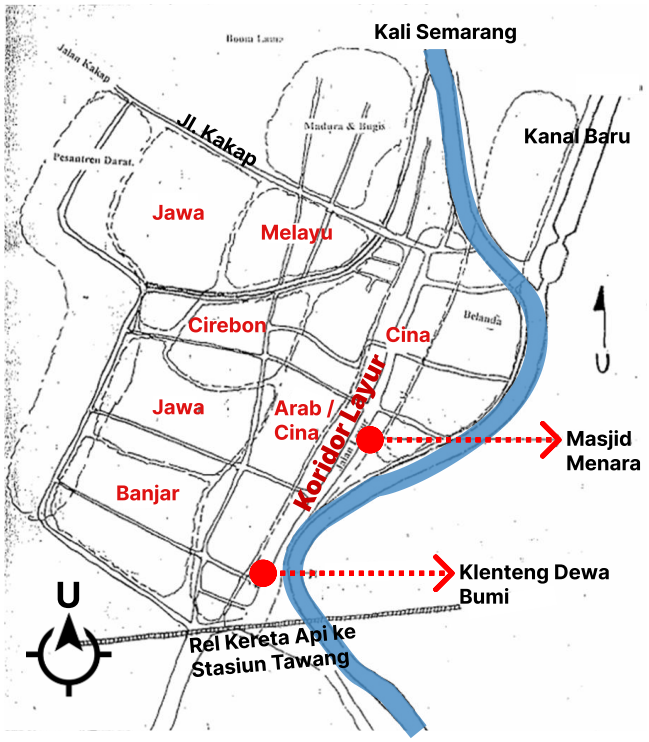


Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Melayu dikenal sebagai kawasan *Boom Lama* (pelabuhan lama) dan menjadi gerbang perdagangan utama Semarang. Toponimi "Melayu" merujuk pada kata *Malaya* karena mayoritas penduduk awal menggunakan bahasa Melayu sebagai *lingua franca*. Struktur demografinya heterogen dengan komunitas lokal, Melayu, Banjar, Bugis, Madura, Cirebon, Arab, Koja, dan Tionghoa yang menempatkan Koridor Layur sebagai simpul utama kawasan (Widiangkoso 2002; Rukayah and Abdullah 2021).



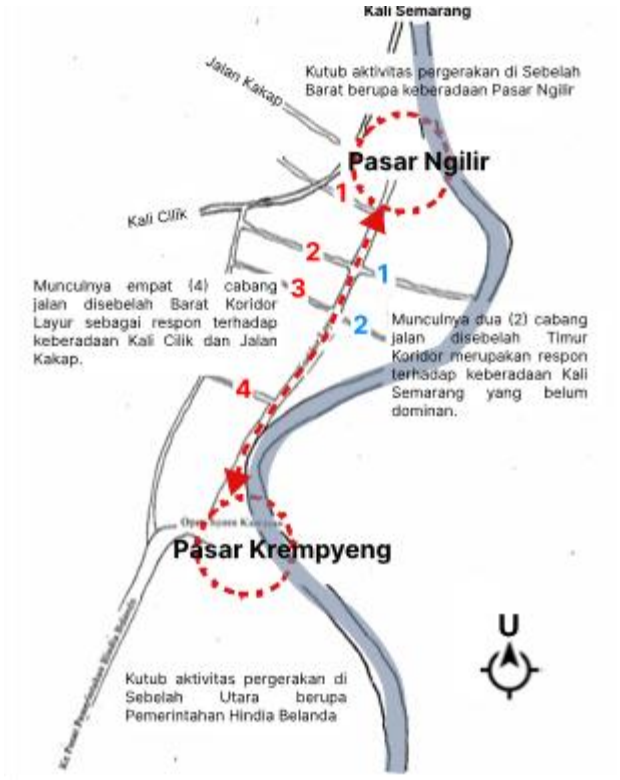


Gambar 2. Kawasan kampung Melayu sebagai KampungMulti Etnis

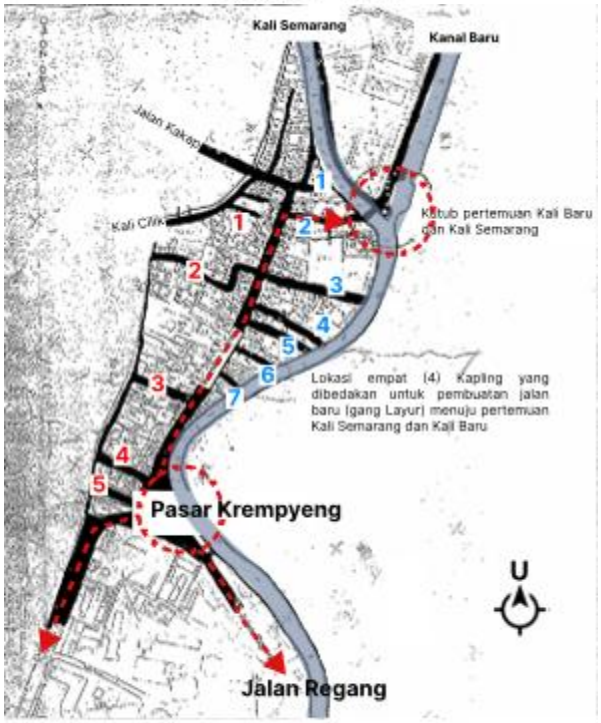
Untuk menganalisis morfologi kawasan, penelitian menggunakan kerangka Urban Design Trancik (1986) yang meliputi Linkage, Figure-Ground, dan Place, kemudian diperdalam dengan pendekatan morfogenetik Conzen (1960).

3.1. Linkage

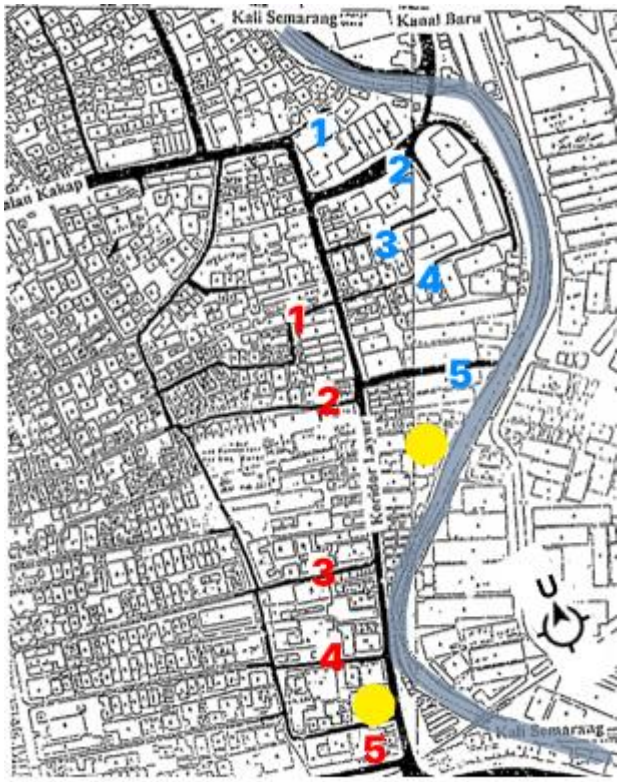
Sistem *linkage* di Koridor Layur terbentuk bukan sebagai penghubung fisik statis melainkan sebagai akumulasi pertumbuhan kavling organik dari abad ke-17 hingga ke-20 dengan pola *incremental urbanism* yang khas pada kawasan perdagangan pesisir (Widodo 2004).



Peta Rekonstruksi Permukiman abad 17 - 18 M



Peta Rekonstruksi Permukiman abad 18 - 19 M



Gambar 3. Perkembangan Lingkage Koridor Layur

Jalan Layur terbentuk pada awal 1700-an sebagai respons terhadap dua magnet aktivitas yaitu Pasar Ngilir di utara dan Pusat Pemerintahan Hindia Belanda di selatan.

Hasil observasi lapangan (2020–2024) menunjukkan bahwa jaringan lorong di koridor ini terdiri dari tiga lapis sirkulasi. Lapis pertama adalah Jalan Layur sebagai arteri utama yang bersifat publik dan komersial. Lapis kedua adalah gang-gang sempit berukuran 1,2 hingga 2 meter yang menghubungkan kavling Tionghoa di depan dengan hunian Arab di belakang. Lapis ketiga adalah ruang transisi privat berupa selasar dalam kavling yang hanya dapat diakses penghuni. Pola negosiasi harian ini dikonfirmasi oleh penuturan penghuni lorong yang telah menetap:

"Lorong ini bukan sekadar jalan pintas. Setiap pagi saya melewatinya untuk ke masjid, dan selalu berpapasan dengan tetangga Tionghoa yang membuka toko. Sudah puluhan tahun begitu, tidak pernah ada masalah."

Pengamatan diakronik dari abad ke-17 hingga akhir abad ke-20 menunjukkan pergeseran peran Koridor Layur dari pusat perdagangan primer menjadi jalur sirkulasi permukiman seiring peralihan moda transportasi dari air ke darat (Widiangkoso 2002; Rukayah et al. 2021). Meskipun demikian, *linkage* sosial-budaya tetap bertahan melalui aktivitas keagamaan di Masjid Menara menjelang Lebaran dan upacara harian di Klenteng Dewa Bumi menciptakan ritme komunal yang memelihara kohesi sosial antaretnis. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem *linkage* di Layur bekerja melampaui fisik jalan dengan menjadi wadah bagi kontinuitas tradisi di tengah perubahan struktur kota, selaras dengan kajian morfologi koridor bersejarah di Asia Tenggara (Thinh and Kamalipour 2022; Le et al. 2025).

3.2. Figure-Ground

Analisis *Figure-Ground* menunjukkan bahwa pola tata ruang Koridor Layur dapat dikategorikan sebagai *organic patterns* karena lahir dan berkembang secara spontan tanpa perencanaan formal (Widiangkoso 2002). Perbandingan peta diakronik menghasilkan tiga periodisasi transformasi morfologi berdasarkan data primer penulis.

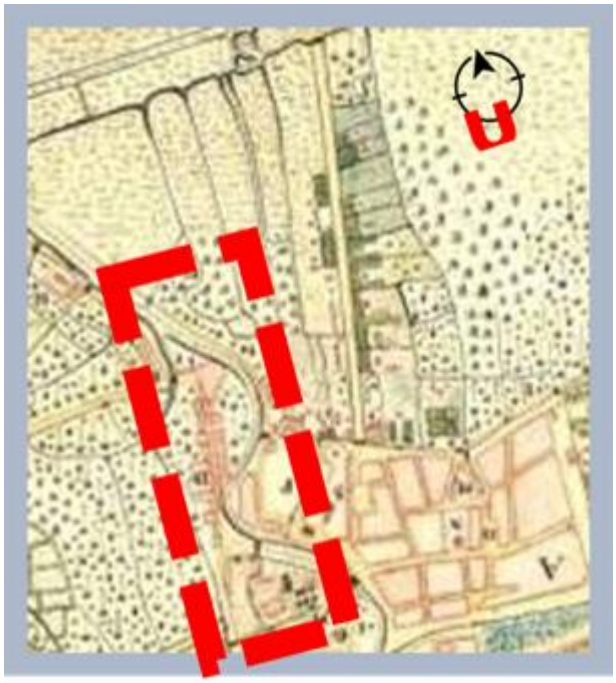




Figure Ground abad 18 - 19 M

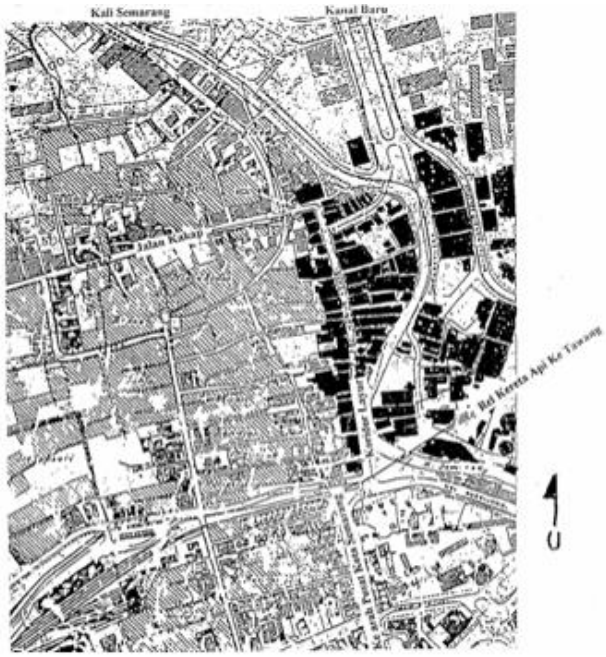


Figure Ground abad 19 - 20 M

Gambar 4. Perkembangan Figure Ground Koridor Layur

Perbandingan peta diakronik menghasilkan tiga periodisasi transformasi morfologi sebagaimana tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. **Perubahan Kavling Koridor Layur**

Periode	Sisi Barat	Sisi Timur
Abad ke-17 hingga 1700-an	Kavling besar dan renggang, orientasi tegak lurus Jalan Layur.	Kavling besar dan renggang, orientasi tegak lurus Jalan Layur.
Periode tengah Peta BPN 1880	**71 kavling** ditambah 1 klenteng kepemilikan campur Cina-Arab	**57 kavling** ditambah 1 Masjid Menara kepemilikan campur Cina-Arab
Periode modern Data eksisting 2020-an	**63 kavling**	**33 kavling**
	Rumah tinggal 28	Rumah tinggal 11
	Ruko 22	Ruko 15
	Tidak difungsik-an 13	Kosong 6
	Sarang walet 1	Sarang walet 1

Berdasarkan Tabel 1, penurunan jumlah kavling dari 71 menjadi 63 di sisi Barat dan dari 57 menjadi 33 di sisi Timur bukan merupakan indikasi berkurangnya densitas kawasan, melainkan mencerminkan terjadinya konsolidasi kavling (*plot amalgamation*) yaitu penggabungan beberapa kavling kecil menjadi satu unit yang lebih besar untuk mengakomodasi fungsi ruko berlantai dua. Densifikasi yang dimaksud merujuk pada intensitas bangunan dan okupansi lantai, bukan pada penambahan jumlah kavling. Pola ini konsisten dengan temuan konsolidasi kavling pada kawasan perdagangan bersejarah di Asia Tenggara (Haeri et al. 2025; Le et al. 2025).

Pola pengkaplingan yang terbentuk menunjukkan negosiasi etnis melaui perbedaan bentuk tanah. Kapling pendek milik etnis Tionghoa memberikan akses langsung ke jalur perdagangan di bagian depan, sementara kapling panjang milik etnis Arab mengutamakan privasi domestik melalui posisi gerbang yang tersembunyi di bagian belakang. Orientasi kavling panjang ke belakang sebagai strategi privasi dikonfirmasi oleh narasumber dari komunitas Arab Hadramaut:

"Tanah kami memang panjang ke belakang. Bagian depan memang untuk usaha kalau mau, tapi kami lebih suka tenang di

dalam. Rumah itu tempat keluarga, bukan untuk orang lain lihat."

Perbedaan tersebut merupakan wujud fisik dari etos spasial dua komunitas yang saling melengkapi. Melalui perspektif *spatial agency*, kavling berperan sebagai artefak yang bekerja aktif mendistribusikan hak dan kewajiban sosial antar dua komunitas (Awan et al. 2011; Achmadi and Josey 2023).

Faktor-faktor pembentuk *organic patterns* di Koridor Layur mencakup:

1) Topografi (*The Role of Topography*)
   Kali Semarang sebagai jalur transportasi sejak abad ke-15 melahirkan Dusun Ngilir yang berkembang menjadi embrio Kampung Melayu.
2) Pembagian Lahan (*Land Division*)
   Pembagian lahan awalnya didasarkan pada kelompok etnis (Kampung Banjar, Arab, Cina, Cirebonan, Jawa) kemudian berkembang menjadi *sharing space* yang terwujud dalam kemunculan Pasar Krempyeng sebagai ruang publik bersama dan pola kavling campur Cina-Arab dalam peta 1880.
3) Penyatuan Komunitas (*Synoecism*)
   Penyatuan komunitas terwujud dalam ruang publik hibrida berupa Pasar Ngilir dan klaster religius Masjid Menara dan Klenteng Dewa Bumi sebagai *communal anchors* (Samore 2025).
4) Hukum dan Aturan Sosial (*The Law and Social Order*)
   Interaksi antar-pedagang perantau dari berbagai daerah di Kampung Melayu menciptakan budaya toleransi yang dominan, sehingga meminimalisir berkembangnya sentimen rasialis. Ketertiban sosial pada masa lampau dikelola melalui kepemimpinan ganda Kapten Arab (dari keturunan Al Jufri Putih) dan Kapten Cina yang ditunjuk Hindia Belanda menciptakan tata kelola informal yang mengakui kekhasan masing-masing komunitas.

3.3. Place

Mengacu pada teori *Place* Trancik (1986) dan konsep *sense of place* (2022), ruang perkotaan bermakna ketika memiliki identitas, narasi sejarah, dan ikatan emosional. Di Koridor Layur, karakteristik *place* terbentuk dari akumulasi sejarah perdagangan dan religi yang terekspresi melalui dua *landmark* monumental yaitu Klenteng Dewa Bumi dan Masjid Menara. Kajian terkini menegaskan bahwa *landmark* religius multietnis berfungsi sebagai "jangkar kolektif" yang memperkuat memori kawasan dan kohesi sosial antarpenghuni (Grimshaw and Mates 2022; Mayer and Pawlik 2023; Haeri et al. 2025).



Gambar 5. Koridor Layur dimaknai tempat perdagangan dan religius

Seperti ditunjukkan pada Gambar 5, dua *landmark* religius ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas komunitas masing-masing melainkan juga sebagai simpul visual yang menjangkar seluruh struktur morfologi koridor. Klenteng Dewa Bumi (selesai 1901) memperlihatkan adaptasi morfologi melalui posisi bangunan yang tegak lurus terhadap Kali Semarang dan pintu masuk utama yang berorientasi ke jalan. Keunikan utama klenteng ini terletak pada aspek teologisnya yakni tidak dipujanya Dewa Mazu yang umum ditemukan di kawasan pesisir, melainkan Dewa Bumi. Adaptasi teologis Klenteng Dewa Bumi sebagai manifestasi *lived religion* dikonfirmasi oleh narasumber sebagai berikut:

"Klenteng kami menyembah Dewa Bumi, bukan Mazu seperti di pesisir lain. Karena kami pedagang darat, bukan nelayan. Dewa Bumi yang menjaga rezeki kami di sini."

Hal ini mengungkap identitas sosiologis komunitas Tionghoa di sepanjang Koridor Layur yang berprofesi sebagai pedagang eceran daratan (*retailers*) dan bukan pelaut. Ini adalah contoh praktik keagamaan yang menyesuaikan diri dengan realitas ekonomi dan spasial kehidupan sehari-hari, sejalan dengan konsep lived religion (Samore 2025; Sun et al. 2025).

Di sisi lain, Masjid Menara (1802 M), dibangun ulama Arab Hadramaut di atas 27 wakaf rumah, berfungsi sebagai *landmark* visual yang vital. Fungsi Masjid Menara sebagai penanda teritorial komunitas Arab dikuatkan oleh penuturan narasumber sebagai berikut:

"Menara itu sudah ada sebelum kakek saya lahir. Bagi kami orang Arab di sini, menara itu tanda bahwa kami ada, bahwa kami bagian dari kota ini. Meskipun rumah kami di belakang, semua orang tahu kami di sini karena menara itu."

Menara silinder menyerupai mercusuar menjadi penanda simbolik yang sekaligus merepresentasikan identitas religius, memori historis, dan klaim teritorial komunitas Arab di ruang publik koridor. Meski bangunan hunian Arab tersembunyi di balik ruko Tionghoa, kehadiran komunitas ini dinyatakan secara visual melalui Masjid Menara sebagai lapisan ruang yang dapat dibaca dari jarak jauh.

3.4. Diskusi

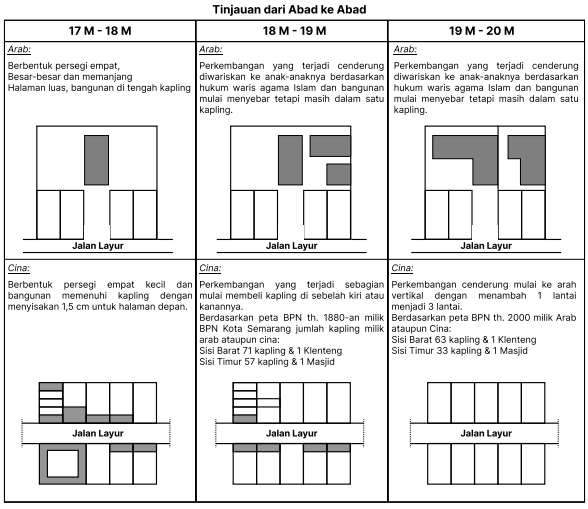
Temuan ketiga analisis di atas, dibaca melalui kerangka produksi ruang Lefebvre (1991) mengungkap mekanisme yang tidak dapat dijelaskan melalui urban morphology konvensional. Regulasi *Wijkenstelsel* merepresentasikan ruang yang dirancang oleh penguasa kolonial sebagai sistem segregasi etnis berbasis wilayah. Namun temuan morfologi Koridor Layur menunjukkan bahwa komunitas Arab dan Tionghoa secara aktif memproduksi ruang yang dihidupi melalui nilai religius, praktik dagang, dan kesepakatan keruangan informal yang justru menghasilkan integrasi spasial berlapis (Stanek 2020; Viderman et al. 2023).

Temuan ini mengungkap sudut pandang berbeda terhadap dua asumsi utama dalam kajian perkotaan kolonial. Pertama, bahwa *Wijkenstelsel* secara efektif menciptakan segregasi yang *hermetic* (Kusno 2000; Widodo 2004). Kedua, bahwa morfologi kawasan *Global South* yang tumbuh organik tidak mengandung logika internal yang dapat dianalisis secara sistematis (Budiman and Kusno 2025). Sebaliknya, Koridor Layur membuktikan adanya mekanisme dialektika spasial berlapis yang memenuhi kepentingan ekonomi publik dan nilai privasi religius dalam satu kesatuan lahan. Mekanisme koeksistensi informal yang berlangsung tanpa regulasi formal ini diungkap narasumber:

"Kami sudah lama hidup berdampingan. Mereka punya cara hidup sendiri, kami punya cara hidup sendiri. Tapi kalau ada hajatan, kami tetap saling bantu. Tidak perlu diatur, sudah jalan sendiri dari dulu."

Koeksistensi tersebut difasilitasi oleh tiga elemen arsitektur sebagai agen mediasi sebagai berikut:

1) Ruko Tionghoa sebagai Visual Buffer Ekonomi-Privat
   Peningkatan densitas kavling sejak tahun 1880 hingga periode modern pada data Figure Ground menunjukkan adanya tekanan ruang tinggi yang menuntut strategi adaptasi pada Koridor Layur. Masyarakat merespons kondisi tersebut melalui praktik *lived religion* dengan menempatkan nilai religi ke dalam tata fisik harian serta menegosiasikan batas antara ruang publik dan privat.

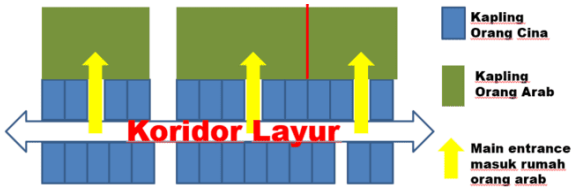


Gambar 6. Posisi Ruko Tionghoa di Depan dan Hunian Arab di Belakang

Seperti ditunjukkan pada Gambar 5, secara arsitektural massa ruko Tionghoa berlantai dua bertindak sebagai visual buffer guna melindungi hunian Arab dari paparan aktivitas jalanan. Tanpa mediasi arsitektural tersebut, komunitas Arab akan menghadapi hambatan dalam menjaga privasi religius sekaligus berpartisipasi pada ekonomi kawasan. Keberadaan ruko Tionghoa

memecahkan hambatan ini melalui pembagian zonasi dalam satu kavling memanjang yang merefleksikan kesepakatan spasial antara pragmatisme ekonomi Tionghoa pada sisi depan serta nilai kesalehan keluarga Arab pada sisi belakang. Fenomena ini membuktikan bahwa morfologi Koridor Layur terbentuk oleh negosiasi nilai agama yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari hari.

2) Lorong Organik sebagai Ruang Negosiasi
Temuan pola *linkage* membuktikan bahwa jaringan lorong di Koridor Layur bekerja secara aktif dalam mengatur hubungan sosial sesuai konsep *spatial agency*.



Gambar 7. Jaringan Lorong yang Menembus Blok Bangunan

Pada Gambar 6 ditunjukkan bahwa jaringan lorong organik bekerja secara aktif mengatur hubungan sosial sesuai konsep *spatial agency* (Awan et al. 2011). Lorong berfungsi sebagai zona kontak yang mewadahi negosiasi harian mengenai hak lintas antara penghuni ruko Tionghoa di bagian depan dan pemilik hunian Arab di bagian belakang. Melalui mekanisme ini, potensi konflik teritorial bertransformasi menjadi kesepakatan kerja sama yang memperkuat kohesi sosial, konsisten dengan temuan studi koeksistensi multietnis di kawasan bersejarah Asia.

3) Landmark Religius sebagai Identitas Tempat
Identitas tempat (*Place*) di Koridor Layur terbentuk melalui adaptasi simbol arsitektur terhadap konteks lokal serta ruang bersama. Masjid Menara dan Klenteng Dewa Bumi menjadi jangkar identitas yang menegaskan eksistensi komunitas pada ruang publik. Menara masjid berfungsi ganda sebagai mercusuar untuk keselamatan maritim, sementara Klenteng Dewa Bumi menyesuaikan teologi dengan profesi dagang daratan. Secara simbolis, posisi Masjid Menara di baris depan mewakili komunitas Arab yang bermukim di lapisan belakang kawasan. Fleksibilitas arsitektural ini merupakan pernyataan spasial bahwa komunitas tersebut hadir dan diakui dalam ruang publik. Hal tersebut membuktikan bahwa koeksistensi di Layur terwujud melalui penyesuaian simbol budaya guna menjaga keharmonisan morfologi kawasan multietnis.

Sintesis ketiganya menghasilkan tipologi *"Dialektika Spasial Berlapis"* yang berbeda dari model segregasi horizontal (satu etnis satu blok) maupun integrasi penuh yang mengabaikan perbedaan kultural. Dialektika spasial berlapis beroperasi melalui diferensiasi vertikal berupa lapisan ruang dalam satu kavling yang masing-masing mengakomodasi kebutuhan berbeda namun saling mendukung. Model ini memiliki tiga implikasi teoritis. Pertama, ketahanan sosial multietnis bukan produk dari perencanaan yang mengabaikan perbedaan, melainkan dari arsitektur yang mengakomodasi perbedaan. Kedua, model ini berkontribusi pada perdebatan *comparative urbanism* dengan menyediakan contoh empiris *Global South* tentang kecerdasan spasial *ordinary cities* (Robinson 2022). Ketiga, temuan ini memperluas kerangka Lefebvre (1991) dari konteks sosiologi ke mekanisme morfologi arsitektur konkret pada skala kavling, bangunan, koridor, dan kawasan, yang merupakan kontribusi baru bagi kajian *urban morphology* kawasan multietnis di Asia Tenggara.

Dari perspektif ketahanan kawasan heritage, keberlanjutan dialektika spasial berlapis di Koridor Layur mengonfirmasi bahwa ketahanan sosial bersumber dari praktik kultural yang tertanam dalam morfologi, bukan sekadar preservasi fisik. Hal ini selaras dengan pendekatan *Historic Urban Landscape* (HUL) UNESCO yang menempatkan warisan budaya sebagai proses hidup yang berkontribusi pada keberlanjutan sosial (Francini and Rozochkina 2024).

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa morfologi Koridor Layur merepresentasikan ruang hidup yang terbentuk melalui evolusi panjang sejak awal abad ke-17. Integrasi antaretnis di Layur tidak terbentuk melalui pembagian wilayah horizontal yang kaku melainkan melalui mekanisme *dialektika spasial berlapis* yang bekerja pada tiga elemen arsitektur secara simultan. Ruko Tionghoa berlantai dua berfungsi sebagai *visual buffer* yang memisahkan ruang ekonomi publik di lapisan depan dari hunian Arab berorientasi privat di lapisan belakang. Jaringan lorong organik bekerja sebagai simpul negosiasi harian yang mentransformasi potensi konflik teritorial menjadi kesepakatan kerja sama lintas etnis. Masjid Menara dan Klenteng Dewa Bumi berfungsi sebagai jangkar identitas yang menegaskan eksistensi masing-masing komunitas dalam ruang publik koridor.

Ketiga elemen ini bersama-sama membentuk sistem *sharing space* yang memungkinkan dua komunitas dengan orientasi spasial yang berbeda, yakni pragmatisme ekonomi Tionghoa dan kesalehan privat Arab Hadramaut, untuk hidup berdampingan dalam satu koridor padat selama berabad-abad. Temuan ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial Koridor Layur bersumber dari kecerdasan arsitektural komunitas yang mengakomodasi perbedaan budaya dalam struktur morfologi, bukan dari perencanaan formal. Dengan memperluas kerangka Lefebvre (1991) ke dalam analisis morfologi arsitektur konkret, penelitian ini mengidentifikasi *dialektika spasial berlapis* sebagai mekanisme negosiasi yang bekerja pada skala mikro kavling dan bangunan hingga skala makro koridor dan kawasan, dan menawarkan perspektif baru bagi kajian koeksistensi multietnis di kawasan bersejarah Asia Tenggara.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, sebagai studi kasus intrinsik pada satu koridor, temuan *dialektika spasial berlapis* belum tentu berlaku umum pada kawasan multietnis lain dengan konfigurasi etnis dan regulasi kolonial yang berbeda. Kedua, rekonstruksi diakronik bergantung pada tiga titik data peta historis abad ke-18 hingga ke-20 sehingga transformasi morfologi pada periode di antaranya tidak sepenuhnya terekam. Ketiga, wawancara mendalam terbatas pada informan kunci komunitas Arab dan Tionghoa sehingga perspektif kelompok etnis lain di Kampung Melayu, seperti Banjar dan Melayu belum tercakup. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan cakupan komparatif dan sumber data yang lebih luas.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa arah pengembangan dapat diajukan. Pertama, strategi revitalisasi Koridor Layur perlu mempertahankan jaringan lorong sebagai infrastruktur sosial aktif, bukan sekadar elemen fisik yang dilindungi, melalui panduan desain yang mengakui fungsi lorong sebagai ruang negosiasi antarpenghuni. Kedua, tipologi ruko-hunian sebagai sistem *visual buffer* perlu dikelola sebagai warisan arsitektural hidup dengan kebijakan yang mendorong adaptasi fungsi tanpa merusak proporsi dan orientasi bangunan terhadap koridor. Ketiga, posisi Masjid Menara dan Klenteng Dewa Bumi sebagai jangkar identitas kawasan perlu diintegrasikan dalam rencana konservasi yang menempatkan keduanya sebagai sistem penanda spasial, bukan objek tunggal yang dilestarikan secara terpisah. Keempat, model *dialektika spasial berlapis* yang ditemukan di Koridor Layur perlu diuji secara komparatif pada kawasan multietnis serupa di Penang, Surabaya, dan Makassar untuk mengukur generalisabilitas tipologi dan potensi penerapannya sebagai panduan intervensi spasial kawasan bersejarah di Asia Tenggara.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didanai oleh Dana RKAT Fakultas Teknik Tahun 2025, Universitas Diponegoro dengan skema Penelitian Strategis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada narasumber di Koridor Layur Kampung Melayu Semarang atas waktu dan informasi yang diberikan, serta kepada Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro atas dukungan institusional dalam pelaksanaan penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, A. and Josey, B. 2023. Cosmopolitan Subaltern: Transnational Spatial Agency on the Fringe of the Worlding Cities of

the Global South. *Architectural Theory Review* 26(3), pp. 600–620.

Ahn, B. 2024. The Politics of Living-with-Difference: Local Perception of Diversity and Coexistence around Participatory Place-Making in a Multiethnic Neighbourhood. *Urban Research & Practice* 17(2), pp. 211–232.

Awan, N., Schneider, T. and Till, J. 2011. *Spatial Agency: Other Ways of Doing Architecture*. Routledge.

Budiman, M. and Kusno, A. 2025. Introduction: Collective Memory, Marginality, and Spatial Politics in Urban Indonesia. In: Budiman, M. and Kusno, A. eds. *Collective Memory, Marginality, and Spatial Politics in Urban Indonesia*. Palgrave Macmillan.

Charalambous, N. 2020. Spatial Forms of Ethnic Coexistence in Ottoman Cyprus: The Role of Urban Form in Patterns of Everyday Life. *Journal of Urban History* 46(1), pp. 90–107.

Conzen, M.R.G. 1960. *Alnwick, Northumberland: A Study in Town-Plan Analysis*. Institute of British Geographers.

Creswell, J.W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 3rd ed. SAGE Publications.

Erfani, G. 2022. Reconceptualising Sense of Place: Towards a Conceptual Framework for Investigating Individual-Community-Place Interrelationships. *Journal of Planning Literature* 38(1), pp. 62–78.

Fakih, F. 2023. Colonial Domesticity and the Modern City: Bandung in the Early Twentieth-Century Netherlands Indies. *Journal of Urban History* 49(4), pp. 812–831.

Francini, C. and Rozochkina, T. 2024. *Cultural Heritage and Urban Development: Embracing the Historic Urban Landscape Approach*. Springer.

Grimshaw, L. and Mates, L. 2022. "It's Part of Our Community, Where We Live": Urban Heritage and Children's Sense of Place. *Urban Studies* 59(14), pp. 2890–2908.

Haeri, M., Faizi, M. and Raheb, G. 2025. Toward an Integrative Framework of Urban Morphology: Bridging Typomorphological, Sociological, and Morphogenetic Traditions. *Land* 14(12), p. 2323.

Kusno, A. 2000. *Behind the Postcolonial: Architecture, Urban Space, and Political Cultures in Indonesia*. Routledge.

Le, V.H., Nguyen, T.T. and Tran, Q.B. 2025. Spatial Morphology of Canal Residences from the Perspective of Cultural Ecology. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering* 24(3), pp. 1120–1138.

Lefebvre, H. 1991. *The Production of Space*. Basil Blackwell.

Mayer, M. and Pawlik, K. 2023. Politics of Memory, Heritage, and Diversity in Modern China. *Journal of Chinese Governance* 8(3), pp. 261–283.

Padawangi, R. 2025. *Desegregation in Action: Understanding Livability from Kampung Advocacy by Chinese-Indonesian Urban Activists*. Springer.

Robinson, J. 2022. *Comparative Urbanism: Tactics for Global Urban Studies*. Wiley-Blackwell.

Rukayah, R.S. and Abdullah, M. 2021. In Searching Architecture and City Pattern as the Mark of Old Coastal Semarang, Indonesia. *Journal of Architectural Design and Urbanism* 3(2), pp. 72–83.

Rukayah, R.S., Syafei, W.A., Abdullah, M. and Etenia, A. 2021. The Diversity of Multi-ethnic Dutch Area Corridors Leading to the City Square of Semarang, Indonesia. *ISVS e-Journal* 8(1), pp. 1–22.

Samore, I. 2025. Religious Buildings, Cultures, Spatiality: New Urban Narrations Between Semiotics and an Intercultural Application of Law. *International Journal for the Semiotics of Law* 38, pp. 1173–1186.

Stanek, L. 2020. *Architecture in Global Socialism: Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War*. Princeton University Press.

Sun, Q., Zhang, Y. and Wang, H. 2025. Urban Development and Cultural Integration: Spatial Analysis of Hui Ethnic Group

Area in Xi'an. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*.

Thinh, N.X. and Kamalipour, H. 2022. Mapping Urban Morphology: Micro-Typologies of Vacant Lots in Urban Tissues. *Urban Science* 6(2), p. 41.

Trancik, R. 1986. *Finding Lost Space: Theories of Urban Design*. Van Nostrand Reinhold Company.

Viderman, T., Geddes, I. and Psathiti, C. 2023. Lived Urban Form: Using Urban Morphology to Explore Social Dimensions of Urban Space. *Journal of Public Space* 8(3), pp. 79–92.

Widiangkoso, E. 2002. *Morfologi Kampung Melayu, Studi Kasus: Morfologi Koridor Layur, Semarang*. Universitas Diponegoro.

Widodo, J. 2004. *The Boat and the City: Chinese Diaspora and the Architecture of Southeast Asian Coastal Cities*. Marshall Cavendish Academic.